

JELANG MUDIK LEBARAN

Waspadai Potensi Bencana Hidrometeorologi

YOGYA (KR) - Menjelang arus mudik Lebaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi di wilayah DIY. Sebab, cuaca ekstrem terkadang datang mendadak, kondisi itu dikhawatirkan bisa mengganggu perjalanan para pemudik.

"Apabila terjadi hujan deras dengan durasi panjang, ruas jalan ring road perlu menjadi perhatian karena berpotensi terjadi genangan. Untuk itu kami mengimbau kepada para pemudik untuk selalu meningkatkan kewaspadaan. Adapun untuk ruas jalan di DIY secara umum sebenarnya tidak berpotensi

terjadi banjir. Hanya saja, terkadang ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan, sehingga menyumbat aliran sungai," kata Kepala Pelaksana BPBD DIY Noviar Rahmad, di Yogyakarta, Minggu (31/3). Dikatakan, guna mengantisipasi cuaca ekstrem yang kemungkinan terjadi,

selain melakukan mitigasi bencana, pihaknya juga menyiapkan Forum Pengurangan Risiko Bencana yang ada di tiap kalurahan yang sampai saat ini sudah berjumlah 339 kalurahan/Kalurahan Tangguh Bencana. Tentunya semua upaya itu akan bisa optimal apabila diimbangi dengan peningkatan kapasitas, pengetahuan sikap dan ketrampilan masyarakat terkait pengurangan risiko bencana. Termasuk menguatkan kerja sama lintas stakeholder. Apabila hal itu bisa dilaksanakan dengan baik, antisipasi terhadap terjadinya bencana alam bisa dilakukan se-

cara optimal. "Sampai saat ini saya tidak pernah bosan mengingatkan kepada masyarakat

yang didalamnya termasuk para pemudik untuk mewaspadai adanya bencana hidrometeorologi. De-

ngan adanya kewaspadaan tersebut diharapkan mereka bisa mengetahui langkah atau tindakan apa yang per-

lu dilakukan, sehingga terjadinya hal-hal tidak diinginkan bisa diminimalisir," terangnya. (Ria)-f



HINDARI PROGRAM TUMPANG TINDIH

Optimalisasi Kelurahan Budaya Perkuat Sektor Wisata

YOGYA (KR) - Kelurahan budaya saat ini menjadi salah satu program yang cukup digencarkan di masing-masing wilayah. Inisiasi dari Pemda DIY tersebut harus mampu ditangkap dengan baik agar memberikan daya dukung pembangunan bagi daerah. Terutama optimalisasi kelurahan budaya agar memperkuat sektor pariwisata di Kota Yogya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogya Dwi Saryono, menyebut program pembangunan yang digulirkan Pemkot Yogya saat ini ialah mengedepankan budaya sebagai nafas daya tarik wisata. "Wisata berbasis budaya selalu menjadi dasar pembangunan di Kota Yogya. Hadirnya program kelurahan budaya seharusnya memberikan daya dukung yang semakin kuat," tandasnya.

Akan tetapi, Dwi Saryono, menilai kelurahan budaya yang sudah ada belum dioptimalkan peranannya dalam mendukung pariwisata. Begitu juga peran dalam hal pelestarian budaya berbasis kampung. Sesuai pentahapan, sebelum menyanggah status sebagai kelurahan budaya, terlebih dahulu diajukan sebagai rintisan kelurahan budaya. Bagi yang sudah menyabet status kelurahan budaya pun masih akan dikembangkan agar menjadi kelurahan mandiri budaya. Ketika sudah berhasil memenuhi ta-

Dwi Saryono
Fraksi PDI Perjuangan



KR-Ardhi Wahdan

hapan sebagai kelurahan mandiri budaya, maka kelurahan tersebut mampu mendapatkan akses terhadap danais mulai dari perencanaan, usulan hingga evaluasi.

Menurut Dwi Saryono, kebijakan dari Pemda DIY terkait kelurahan budaya sejatinya menjadi motivasi bagi masing-masing kelurahan. "Saat ini program tersebut oleh Pemkot Yogya seperti dipandang sebagai produk kebijakan semata. Bisa dilihat misalnya

Dinas Kebudayaan yang gencar mempromosikan potensi budaya yang menjadi daya tarik wisata. Itu berbanding terbalik, di mana Dinas Kebudayaan seharusnya menjadi pamong bagi warga, kelompok atau kampung yang berbasis budaya. Setelah itu baru ditanggap potensinya oleh Dinas Pariwisata. Jangan sampai tumpang tindih," paparnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap ada sinkronisasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja tiap organisasi perangkat daerah. Terutama yang berkaitan dengan unsur kebudayaan dan pariwisata. Celah yang bisa menimbulkan program tumpang tindih harus diantisipasi. Fungsi Dinas Kebudayaan dalam membina dan mengoptimalkan kelurahan budaya perlu dipertegas kembali. Wilayah yang sudah diusulkan sebagai rintisan kelurahan budaya jangan sampai harus bekerja sendiri agar bisa meraih predikat kelurahan budaya. Begitu pula kelurahan mandiri budaya yang baru ada tiga wilayah, harus diupayakan bisa terus ditambah.

"Di sini peran dari Dinas Kebudayaan. Kelurahan mandiri budaya otomatis memiliki akses yang lebih luas dalam menggaet danais untuk pengembangan kampungnya. Baru kemudian Dinas Pariwisata masuk dan hadir dalam menghadirkan daya tarik wisatanya," tandasnya. (Dhi)-f

Unisi Hotel Malioboro Berbagi dengan Santri Panti Asuhan



KR-Devid Permiana

Pemberian tali asih kepada para santri panti asuhan.

YOGYA (KR) - Unisi Hotel Malioboro mengadakan kegiatan bertajuk 'Unisi Berbagi' di Panti Asuhan Miftahunnajah Yogyakarta, Sabtu (30/3). Dalam kegiatan itu, selain pemberian tali asih bagi para anak-anak/santri panti, acara diisi tausiyah dan diakhiri berbuka puasa bersama santri binaan panti.

General Manager Unisi Hotel Malioboro, Dedi R Yusma menuturkan, kegiatan Unisi Berbagi diadakan rutin

setiap tahun, salah satunya saat Bulan Ramadan. Menurutnya, di Ramadan tahun ini ada beberapa lokasi (panti asuhan) yang menjadi sasaran kegiatan, salah satunya Panti Asuhan Miftahunnajah.

"Intinya, melalui kegiatan ini kami (Unisi Hotel Malioboro) ingin berbagi kebahagiaan di Bulan Ramadan yang sangat mulia ini dengan orang-orang yang membutuhkan. Diharapkan mereka juga ikut merasakan keba-

harian saat lebaran nanti," kata Dedi kepada KR di sela kegiatan yang juga diikuti oleh segenap karyawan hotel.

Ahmad Daroji selaku ketua panitia sekaligus HR Manager Unisi Hotel Malioboro menambahkan, dalam kegiatan ini pihaknya memberikan bingkisan dan uang saku kepada para santri panti. Selain itu memberikan bantuan sembako untuk panti asuhan.

Pengurus Panti Asuhan Miftahunnajah, Afiq El Aziz Amali mengatakan, jumlah santri yang dibina oleh panti asuhannya saat ini sebanyak 60 orang. Bantuan yang diberikan ini akan sangat bermanfaat bagi operasional panti dan biaya pendidikan para santri. Pihaknya pun membuka pintu seluas-luasnya menerima infak, sedekah, zakat dan wakaf dari masyarakat luas. (Dev)-f



BADAN PEMBUAT PERATURAN DAERAH (BAPEMPERDA)

Gerak Cepat Tuntaskan Kinerja Legislasi 2024

YOGYA (KR) - Sejak memasuki triwulan pertama tahun ini, Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Yogyakarta sudah tancap gas menjalankan fungsi legislasi. Tidak kurang dari enam panitia khusus (pansus) sudah dibentuk guna membahas Program Pembuatan Peraturan Daerah (Propemperda) maupun persoalan spesifik. Gerak cepat dalam menuntaskan kinerja legislasi juga turut didukung oleh tim eksekutif dalam kesiapan menyiapkan materi.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta Tri Waluko Widodo, menyebut sebagai alat kelengkapan dewan yang memiliki tugas utama dalam mendorong kinerja di bidang legislasi, maka pihaknya tidak bisa berdiam diri.

"Sejak awal tahun sudah banyak pembahasan. Waktu itu bahkan beririsan dengan tahapan Pemilu 2024 sehingga menyita waktu dan energi yang luar biasa. Alhamdulillah, semua bisa berjalan dengan baik," katanya.

Tidak mengherankan, selama proses pemilu hampir semua anggota dewan harus berkecimpung di masyarakat. Banyak agenda politik yang harus dituntaskan oleh legislatif, baik sebagai peserta maupun



KR-Ardhi Wahdan

Emanuel Ardi Prasetyo

wakil dari partai. Kondisi tersebut berimbas pada agenda ke depannya yang harus disesuaikan. Tetapi di sisi lain, kinerja legislasi juga tidak bisa diperlambat seiring kebutuhan produk hukum sebagai pedoman jalannya pemerintahan.

Oleh karena itu, Bapemperda hampir tidak berhenti berkoordinasi dengan eksekutif kaitannya dengan kesiapan naskah raperda yang mendesak untuk dibahas. Widodo mengatakan, dirinya bahkan meminta setiap materi yang sudah siap agar langsung disampaikan ke dewan. Hal ini agar dapat diadagkan pengambil keputusan melalui sidang paripurna.

"Teman-teman di dewan sudah memegang komitmen untuk menuntaskan kinerja dengan baik. Makanya meski kemarin banyak yang sibuk pemilu tetapi agen-



KR-Ardhi Wahdan

Rapat pembahasan yang dilakukan oleh pansus DPRD Kota Yogyakarta akhir Maret lalu.

da legislasi selalu kuum. Saat ini begitu pemilu berlalu, percepatan kinerja juga kami lakukan," imbuhnya.

Total ada 14 produk hukum yang masuk dalam Propemperda tahun 2024. Masing-masing terdiri dari sembilan raperda yang diajukan oleh eksekutif, tiga raperda urusan wajib, dan dua raperda inisiatif dari kalangan dewan. Jumlah target produk hukum itu pun sama dengan tahun 2023 lalu. Sesuai ketentuan, ketika Propemperda bisa dituntaskan 100 persen maka untuk target tahun depan bisa ditambah hingga 25 persen. Dengan begitu tahun ini DPRD Kota Yogyakarta sebetulnya bisa membahas hingga 17 produk hukum. Akan tetapi

Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta tetap menargetkan 14 Propemperda lantaran mempertimbangkan berbagai aspek.

Salah satu aspek yang menjadi pertimbangan ialah adanya harmonisasi dengan Kemenkumham di tahap awal dan berkaitan dengan naskah akademik. Sebelumnya ada tujuh raperda yang sudah disiapkan oleh internal dewan. Akan tetapi hasil dari harmonisasi, ternyata hanya dua raperda yang dinilai paling siap sedangkan lima raperda usulan dewan lainnya masih harus disempurnakan naskah akademiknya terlebih dahulu.

"Pemilu 2024 kemarin juga menjadi pertimbangan kami. Karena setelah pelantikan nanti harus dibentuk alat ke-

lengkapan dulu agar tugas dewan bisa berjalan optimal. Biasanya pembentukan alat kelengkapan penuh dinamika. Sehingga kami memandang, target 14 produk hukum ini sangat realistis," tandasnya.

Oleh karena itu Bapemperda sangat optimis Propemperda tahun ini dapat dituntaskan 100 persen. Pihaknya juga mengupayakan kesiapan naskah akademik atas raperda yang menjadi inisiatif dewan. Dengan begitu pada tahun 2025 mendatang Propemperda bisa dimaksimalkan hingga 17 produk hukum, dan minimal empat raperda di antaranya merupakan inisiatif dari dewan.

Skema pembahasan Propemperda tahun ini



KR-Ardhi Wahdan

Tri Waluko Widodo

juga sudah disiapkan. Setidaknya ada lima raperda yang tengah dibahas pada awal tahun ini. Masing-masing ialah terkait perubahan perda pengelolaan sampah untuk mendukung program desentralisasi sampah di Kota Yogya. Kemudian perda terkait perubahan kelembagaan Bank Jogja dari perumda menjadi perseroda sesuai amanat undang-undang. Setelah itu pencabutan perda terkait pedoman pembinaan LPMK, RT dan RW. Selanjutnya perda terkait pengelolaan air limbah domestik. Terakhir perda untuk laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2023. Dalam waktu dekat sejumlah raperda juga akan segera dilakukan pembahasan setelah disampaikan oleh tim eksekutif.

Sementara Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta Emanuel Ardi Prasetyo,

mengungkapkan sampai saat ini ternyata masih banyak regulasi di daerah berupa perda yang sudah tidak sesuai karena berusia cukup tua atau usang. Pihaknya sudah berkomitmen untuk melakukan penyesuaian terhadap perda yang telah usang tersebut. "Makanya ada beberapa raperda yang itu berkaitan membahas pencabutan perda. Ada juga raperda yang itu merevisi perda yang sudah ada agar bisa sesuai dengan kondisi masa kini," tandasnya.

Jumlah produk hukum yang sudah usang dinilai bahkan bisa mencapai ratusan produk hukum. Akan tetapi seiring dengan terbatasnya Propemperda yang bisa dibahas maka penyesuaian akan dilakukan secara bertahap. Setiap tahun pencabutan dan penyesuaian perda akan selalu diadagkan dengan jumlah yang proporsional. Jika pada tahun tersebut tidak ada persoalan yang mendesak maka jumlah raperda untuk pencabutan atau penyesuaian perda bisa diperbanyak. Sebaliknya, ketika banyak skala prioritas yang harus memiliki payung hukum, maka penuntasan perda usang juga tidak bisa dipaksakan untuk diperbanyak. (Dhi)-f